

NOTONAGORO SEBAGAI HOMO SIGNIFICANS ATAS IDEOLOGI PANCASILA¹

Oleh: Rizal Mustansyir²

Abstract

Pancasila—as a representament, interpretant and object—facing a dilemmatic problem in connection to ideal and a utopia values that desired by the founding fathers and undesired activities in the real life. Pancasila—as an icon, index and symbol that ought to give oportunity for other interpretation, so we do not fall into a monolithic interpretation that makes Pancasila become a trivial thing, as in New Era. The power of Pancasila does not lay at the meaning that gave by political elite all, but it depends on all community involvement to belong to Pancasila as a glorious treasure of Indonesian nation that open to spirit and development of the age. Notonagoro is a Pancasila homo significandum for his attempt to reinterpretate national ideology philosophically. He has used substanstialistical analyzis with refer to the principle words of each principles (God, man, one, people, and justice) was an intelligent attempt to placed Pancasila in the abstract, general and universal meaning. His concept of Pancasila—abstract, general and universal—described the triadic of representament, object and interpretant.

Keywords: *Pancasila, symbol, community involvement, homo-significandum, abstract, general, universal.*

A. Pendahuluan

Tanda merupakan salah satu kebutuhan lahir batin manusia untuk memahami dinamika kehidupannya. Peran tanda dalam kehidupan manusia bahkan setara dengan kebutuhan primer seperti: makan dan minum. Kekurangan makan dan minum menjadikan manusia menderita secara fisik, namun kemiskinan pemahaman akan tanda menjadikan manusia kehilangan momen penting dalam hidupnya bahkan derita batin yang berkepanjangan. Contoh tentang kemiskinan

¹ *Disajikan sebagai Makalah Pendukung dalam Seminar Nasional Mengenang Satu Abad Kelahiran Prof. Notonagoro dengan Tema Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yang Diselenggarakan pada 1 Februari 2006 di Balai Senat UGM, Yogyakarta*

² *Dosen Fakultas Filsafat UGM*

pemahaman atas tanda ialah ketika terjadi bencana alam di Nangroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004, diawali dengan beberapa gempa kecil yang kemudian diikuti dengan gempa yang lebih besar (8,6 skala Richter), lalu disusul badai Tsunami. Tanah longsor yang terjadi di berbagai belahan tanah air belakangan ini seperti: Jember, Banjarnegara, dan lain-lain merupakan tanda alami yang lambat dipahami masyarakat sekitar sehingga menelan banyak korban. Peran tanda yang bersifat alami membutuhkan interpretasi dan momen yang tepat, sebab dapat berakibat fatal, ketika manusia keliru di dalam membaca tanda tersebut. Tanda bukan sekadar aksesoris kehidupan, melainkan merupakan salah satu faktor utama kualitas dan kebutuhan hidup manusia yang sekaligus juga sebagai isi makna hidup itu sendiri.

Tanda juga merupakan jejak—dalam pengertian yang lebih luas bisa dipahami pula sebagai identitas—yang ditinggalkan seseorang atau sesuatu, sehingga dapat diidentifikasi secara cermat sebagaimana halnya Bruder William mampu mengenali tanda yang ditinggalkan kuda Brunellus milik kepala biara yang terlepas dalam kisah *The Name of the Rose* (Umberto Eco, 2004: 27). Tanda mempermudah manusia dalam memahami makna kehidupan sekaligus menjadikan manusia lebih bersikap logis-rasional dalam mengambil satu kesimpulan. *Traffic light* menjadikan pemakai jalan bersifat logis-rasional ketika memacu kendaraannya di jalan raya, sehingga meminimalkan terjadinya kecelakaan.

Kehidupan di sekitar manusia dipenuhi dengan berbagai macam tanda, baik yang dapat ditafsir langsung maupun yang membutuhkan pemahaman secara lebih mendalam. Tanda melibatkan aktivitas mental dan pikiran manusia, sehingga horizon manusia mengalami pengembangan yang pesat tergantung pada kemauan dan kemampuan manusia itu sendiri dalam memahami dan memaknai tanda. Manusia dalam hubungannya dengan pemahaman makna tanda bahkan pembuat tanda dinamakan *Homo significans* (Chandler, 2005: 1).

Tanda itu sendiri dapat mengambil berbagai bentuk dalam kata, suara, bau, rasa, tindakan, atau objek. Namun bukan berarti setiap tanda mengandung makna secara intrinsik, ia mengandung makna manakala kita menanamkan itu ke dalamnya. Segala sesuatu dapat menjadi sebuah tanda sepanjang seseorang menafsirkan itu sebagai bermakna, mengacu atau menggantikan sesuatu yang lain. Manusia hanya berpikir dalam tanda, ujar Peirce dalam *Elements*

of Logic (1998: 169). Namun penafsiran makna atas satu tanda terkait dengan sistem konvensi yang dikenal luas.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang dikonstruksi oleh para pemikir atau elit politik yang memandang perlu adanya sebuah sistem konvensi yang dapat menjadi kekuatan pengikat mental masyarakat. Karena itu Pancasila dapat dibaca dan dipahami sebagai sebuah sistem tanda yang mengitari kehidupan bangsa Indonesia. Kuntowijoyo (1987: 66) menyatakan bahwa manusia itu selalu hidup di tengah-tengah tiga lingkungan, yaitu lingkungan material, lingkungan sosial, dan lingkungan simbolik. Lingkungan simbolik inilah yang meliputi makna dan komunikasi, seperti: bahasa, mite, seni, upacara, konsep, dan sebagainya. Tanda lebih luas cakupannya daripada simbol, atau dengan kata lain simbol merupakan bagian dari tanda yang lebih spesifik.

Notonagoro hanya merupakan segelintir elit Indonesia yang mencoba mereinterpretasi Pancasila. Kendati pun demikian penciptaan makna yang dilakukan Notonagoro menorehkan arti penting Pancasila, terutama pada kawasan filosofis, sesuatu yang termasuk kategori langka pada masa itu. Permasalahannya, apakah penciptaan makna atas tanda dari sebuah ideologi yang dilakukan elit ilmiah bisa diterima atau diakui oleh seluruh masyarakat? Apakah benar Pancasila itu mengandung nilai intrinsik atautkah nilai itu ditanamkan oleh elit ilmiah agar diterima oleh seluruh rakyat Indonesia? Namun mengapa ideologi Pancasila sebagai sistem tanda bangsa Indonesia dewasa ini mengalami degradasi, sehingga maknanya tidak lagi memukau (*striking significance*)? Apakah Pancasila itu sungguh merupakan sebuah kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) atautkah beban sejarah (*historical burden*)?

B. Pembahasan

1. Manusia sebagai homo significans

Manusia adalah makhluk pembuat tanda (*Homo significans*) yang mencoba mengidentifikasi objek di luar dirinya secara logis-rasional. Realitas hidup merupakan rangkaian *enigmatic* yang menuntut pencarian jawaban, yang disebut kebenaran. Karena itulah diperlukan penyelidikan sebagai sebuah kegiatan mencari petunjuk, bukti, tanda (*signs*), serta melihat logika, relasi, kausalitas di antara semuanya untuk memperoleh kesimpulan akhir, *inference* (Piliang, 2003: xix). Tanda melibatkan aktivitas mental dan pikiran

manusia, sehingga horizon manusia mengalami pengembangan yang pesat tergantung pada kemauan dan kemampuan manusia itu sendiri dalam memahami dan memaknai tanda. Penanda (*signifier*) sebagai sesuatu yang konkret berperan sebagai kendaraan tanda di satu pihak dan petanda (*signified*) sebagai bentuk pemahaman makna atau konsep di pihak lain, saling berelasi dalam kehidupan budaya manusia. Aktivitas mental dan pikiran merupakan wahana pengembangan kebudayaan, sehingga pemahaman atas kehidupan menjadi lebih kompleks.

C.S. Peirce, salah seorang filsuf yang sangat kosen dengan masalah tanda, menganalisis tanda dalam bentuk relasi triadik antara *Representament*, *Object*, dan, *Interpretant*. Peirce menegaskan peran dan pengertian ketiganya. Sebuah *representament* adalah sebuah subjek dari relasi triadik terhadap objek sebagai hal kedua, yang terhubung dengan hal ketiga yang dinamakan *interpretant*. Dalam relasi triadik ini setiap *representament* itu menentukan *interpretant*-nya untuk menggantikan relasi triadik yang sama pada objek yang sama untuk beberapa *interpretant* (Deledalle, 2000: 18).

Menurut Peirce tanda mengandung pengertian yang luas, sehingga ia mengatakan bahwa, *nothing is a sign unless it is interpreted as sign*, ketiadaan itu sendiri merupakan tanda sehingga dapat diinterpretasikan sebagai tanda. Tiga kata kunci untuk memahami tanda menurut pemikiran Peirce, yaitu *the Representament, an Interpretant, an Object*. *Representament* adalah bentuk tanda, yang tidak harus bersifat material. Satu *interpretant* bukanlah seorang interpreter, melainkan lebih pada pengertian atau makna yang dibuat tanda. Sebuah objek merupakan sesuatu yang diacu oleh tanda. (Chandler, 2005: 10). Peirce menjelaskan bahwa sebuah tanda adalah sesuatu yang menggantikan seseorang untuk sesuatu dalam beberapa kapasitas. Sebuah tanda tertuju pada seseorang, yaitu dalam pikiran seseorang sebagai sebuah tanda yang ekuivalen, atau barangkali sebuah tanda yang sudah lebih dikembangkan. Tanda menciptakan interpretan dari tanda pertama. Tanda itu menggantikan sesuatu, yaitu objek. Tanda menggantikan objek bukan dalam keseluruhan, melainkan dalam acuan pada satu jenis gagasan, yang biasa dinamakan dasar (*ground*) dari representamen. (Peirce 1931-58,2.228). Interaksi antara representamen, objek, dan interpretan dinamakan semiotik (Peirce, 1931: 5.484).

Dalam hal ini Peirce menjelaskan bahwa sebuah tanda (*Sign or Representament*) adalah hal **pertama** (*a First*) yang terletak pada setiap relasi triadik pada hal **kedua** (*a Second*) yang dinamakan objek, sehingga mampu menentukan hal **ketiga** (*a Third*) yang dinamakan interpretan, menganggap relasi triadik yang sama pada objeknya di situ interpretan itu sendiri berdiri pada objek yang sama.

Tanda (*sign*) berfungsi sebagai *Ground* yang juga merupakan satu kode. Kita harus mengetahui kode lampu lalu lintas di jalan raya, sehingga kita dapat menginterpretasi pergantian warnanya sekaligus menaati peraturan lalu lintas tersebut. Lampu merah mengacu pada larangan untuk lewat, lampu kuning mengacu pada peringatan untuk berhati-hati, lampu hijau mengacu pada perkenan untuk lewat. Sesuatu yang diacu oleh tanda itu dinamakan objek. Interpretasi tentang larangan (lampu merah), peringatan (lampu kuning), dan perkenan untuk lewat (lampu hijau) dinamakan interpretan.

Lebih lanjut Peirce menjelaskan tiga kategori tanda, yaitu *Icon*, *Index* dan *Symbol*. Ia menjelaskan tentang *icon* sebagai berikut: “An *Icon* is a Representament whose Representative Quality is a Firstness of it as a representament. That is, a quality that it has *qua thing renders it fit to be a representament*. Thus, anything is fit to be a *Substitute* for anything that it is like.A Representament by Firstness alone can only have a similar Object (Peirce, 1998: 157). Ikon merupakan tanda kesamaan atau biasa dinamakan metafor. Indeks merupakan tanda yang mengacu pada sesuatu yang dinamakan *metonymy*. Simbol merupakan tanda yang dikonvensi (van Zoest, 1991: 57).

Sebuah *icon* adalah *representament* yang mewakili kualitas sebagai bentuk kepertamaan (*Firstness*). Bahwasanya sebuah kualitas mengandung sesuatu yang mengitari keberadaan sebuah *icon*. Ikon di sini merupakan sesuatu yang berperan sebagai substitusi bagi sesuatu yang mengandung kesesuaian dengan objek. Sebuah representamen melalui kepertamaan sendiri mengandung satu kesesuaian dengan objek yang diwakilinya. Contoh: Notonagoro dapat dikatakan sebagai ikon Filsafat Pancasila di Indonesia, karena kontribusi pemikirannya tentang Pancasila secara filosofis dikenal masyarakat luas.

Indeks adalah tanda yang menunjuk pada sesuatu yang dinamakan *metonymy*. Indeks menurut Peirce adalah sebuah tanda atau representasi yang mengacu pada objeknya bukan lantaran adanya kesesuaian atau analogi dengan objeknya, bukan pula lantaran tanda itu dihubungkan dengan karakter umum yang menunjukkan bagaimana objek terjadi, tetapi disebabkan tanda itu dalam dinamikanya berhubungan sekaligus dengan objek individual di satu pihak dan berhubungan pula dengan indera atau memori seseorang di pihak lain (Peirce, 1998: 170).

Simbol adalah tanda yang dikonvensi. Contoh: Soekarno disimbolkan sebagai penggali Pancasila. Simbol menurut Peirce adalah a sign which is constituted a sign merely or mainly by the fact that it is used and understood as such, whether the habit is natural or conventional, and without regard to the motives which originally governed its selection (Peirce, 1998: 172).

Anthony J. Pennings (2005: 1) menjelaskan secara lebih gamblang tentang ketiga kategori tanda utama. *Pertama*; ikon yaitu tanda yang mengandung hubungan visual atau kesamaan antara tanda dengan sesuatu yang dimaknai. *Kedua*; indeks adalah tanda yang dihubungkan dengan sesuatu atau tindakan yang mencoba untuk memaknai dengan cara yang sama. Contoh: ungkapan di mana ada api di situ ada asap. Penekanannya pada perihal hubungan yang lazim terjadi. *Ketiga*; simbol mengandung hubungan yang total bersifat arbitrer dengan sesuatu yang dihadirkan. Makna simbolik ini tidak pasti, tetapi sangat tergantung pada wacana dan proses sosial. Dengan demikian jelas bahwa simbol merupakan bagian dari tanda.

2. Pancasila sebuah makna intrinsik

Kalau melihat pada arti kata secara etimologis, maka term Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta mengandung dua arti. **Pertama**; *Panca-Syila* dengan huruf I satu berarti berbatu sendi yang lima, berdasarkan yang lima, atau lima dasar. **Kedua**; *Panca-Syiila* dengan huruf Dewanagari dua huruf (ii) berarti lima aturan tingkah laku yang penting. Term Pancasila secara historis mengacu pada pemeluk agama Budha dalam arti lima aturan atau lima prinsip moral yang harus ditaati atau lima larangan yang harus dihindarkan (Bakry, 1994: 8-9). Berdasarkan atas paparan tersebut, jelas bahwa ideologi Pancasila tidak mengandung makna intrinsik

seperti yang berlaku dalam agama Budha, melainkan lebih pada transterminologi.

Kendati pun bersifat transterminologi, namun semangat yang ada pada makna awal masih ada, paling tidak sebagai lima prinsip hidup bernegara. Persoalannya di sini apakah substansi Pancasila yang diisikan oleh elit politik itu benar-benar aspiratif? Kalau kita menggunakan relasi triadik, maka mana yang representamen, objek, dan interpretan? Pancasila jelas merupakan sistem tanda yang disepakati oleh elit politik, sehingga merupakan representamen. Dalam hal ini Pancasila bukanlah sistem tanda yang bersifat material, melainkan mental. Karena ideologi negara itu lebih mengacu pada sikap mental. Kalau kita menyitir pendapat Daoed Joesoef (1987: 18-19) tentang klasifikasi tanah air, maka ia menegaskan secara analitik ada tiga jenis tanah air, real, formal, dan mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan, dibesarkan, yang dialami secara fisik, sehari-hari. Tanah air formal adalah negara-bangsa yang berundang-undang dasar, tempat kita manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya. Tanah air mental lebih merupakan imajinasi yang dibentuk oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital, sehingga cenderung utopis dan metafisik.

Pancasila sebagai sistem tanda yang bersifat mental cenderung utopis dan metafisik, karena ia mengandung cita-cita yang paling ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedemikian ideal dan utopisnya, sehingga peluang atau celah yang memungkinkan timbulnya konflik— misalnya: sila pertama dalam Piagam Jakarta Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelemahan sikap utopis ialah menafikan realitas, bahwasanya mayoritas pemeluk agama Islam “dikalahkan” oleh kepentingan politik, jelas merupakan ganjalan yang sulit dieliminasi begitu saja. Pancasila juga bersifat metafisik dalam arti gagasan abstrak, karena sistem pemikiran dan nilai yang ada di dalamnya bersifat relasi-kategoris. Artinya setiap sila memiliki kategori tersendiri (Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat, dan Adil), tetapi dapat ditarik nisbah di antara kelimanya. Setiap kategori bahkan bisa dikembangkan dalam alur pemikiran yang sangat terbuka dan variatif, juga *debatable*. Pancasila dalam arti utopis dan metafisik inilah yang dikembangkan oleh banyak pemikir Pancasila di Indonesia, termasuk Notonagoro. Misalnya: konsep Pancasila yang bersifat Abstrak-Umum-Universil jelas

merupakan konsep metafisik. Sedangkan sikap utopis terlihat dalam pemikirannya tentang cita-cita masyarakat sosialis-Indonesia yang digambarkan sebagai satu masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan sejahtera, orang-orangnya ramah tamah, berjiwa kekeluargaan, bersemangat gotong royong serta berkesadaran kerja. Negara yang menjamin pemeliharaan kesehatan dan pendidikan setiap warganegaranya supaya tidak perlu menderita dan dapat menjadi warga yang cerdas untuk dapat menunaikan tugas dan haknya terhadap negara dengan sebaik-baiknya (Notonagoro, 1980: 153).

Apakah interpretan dari ideologi Pancasila itu? Satu interpretan bukanlah seorang interpreter, melainkan lebih pada pengertian atau makna yang dibuat tanda. Interpretan di sini tidak mengacu pada PPKI atau elit politik yang melakukan interpretasi terhadap ideologi negara Indonesia, tetapi lebih mengacu pada pengertian atau makna dari ideologi Pancasila itu sendiri. Dalam sejarah bangsa Indonesia, makna ideologi Pancasila itu lebih bersifat konotatif. Pada awalnya ideologi Pancasila itu lebih dimaknai sebagai dasar negara, sesuai dengan maksud mendirikan negara Indonesia merdeka di atas dasar negara yang dipandang mumpuni. Pemahaman makna sebagai dasar negara mengandung konsekuensi atas sistem hukum di Indonesia, apakah sudah benar-benar mencerminkan nilai kelima sila. Ideologi Pancasila juga dimaknai sebagai sistem tanda yang mempersatukan keanekaragaman suku bangsa, kebudayaan, dan agama, sehingga sesanti Bhinneka Tunggal Ika sering dijadikan acuan. Pemahaman ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa mulai terusik dengan berbagai gerakan separatis (GAM), otonomi daerah, gerakan teroris, dan lain sebagainya.

Ideologi Pancasila juga dimaknai sebagai Pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup berarti seluruh perilaku bangsa Indonesia mencerminkan nilai Pancasila. Tenggara ini pun dipertanyakan banyak orang. Mengapa nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokratis, dan keadilan itu sulit diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bahkan yang terjadi justru *kosokbali*-nya, kita memang bangsa religius secara lahiriah, keberingasan dan pelanggaran HAM menggantikan nilai kemanusiaan, etnosentris dan primordialisme yang mendominasi era otonomi daerah menggeser nilai persatuan, *democratic corruption* merajalela dalam nuansa demokrasi, serta kesenjangan kaya-miskin yang terus membayangi cita-cita keadilan sosial.

Perkembangan lebih lanjut, ideologi Pancasila dijadikan paradigma keilmuan, hal ini sering mengundang perdebatan. Apakah benar ideologi Pancasila itu merupakan sistem nilai sekaligus sistem ilmu? Pancasila sebagai sistem nilai lebih bisa diterima oleh banyak orang, karena nilai religiusitas, kemanusiaan, kebangsaan, demokratis, dan keadilan merupakan esensi Pancasila. Tetapi Pancasila sebagai sistem ilmu, belum teruji.

Manakah Pancasila yang diacu sebagai objek tanda bagi bangsa Indonesia itu? Apakah Pancasila seperti yang terdapat dalam kitab Sutasoma? Ataukah Pancasila yang sudah mengalami metamorfosis melalui proses panjang sejak sidang BPUPKI hingga sekarang ini? Jawaban kita tegas, yaitu Pancasila dalam pemahaman yang kedua. Namun masih ada problem yang mengganjal, sejauh manakah proses metamorfosis itu berlangsung? Masihkah dimungkinkan proses metaforsis babak berikutnya? Jawaban terhadap persoalan ini tentu tidak lagi sederhana, karena kedudukan Pancasila sebagai objek tanda yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia sudah dipatrikan secara kuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini Notonagoro mengajukan solusi yang sangat menarik, yaitu dengan melekatkan Pancasila dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berkedudukan sebagai *Staats Fundamental Norm*. Dengan demikian Pancasila sebagai objek tanda bagi bangsa Indonesia berada pada ruang yang aman. Ia ibarat burung nuri dalam sangkar besi, aman dari cakar-cakar ideologi pemangsa.

3. Pancasila dalam trikategori tanda

Trikategori tanda meliputi ikon, indeks, dan simbol. Apakah Pancasila sebagai sistem tanda itu berkedudukan sebagai ikon atau indeks, ataukah simbol? Ikon merupakan tanda kesamaan atau biasa dinamakan metafor. Ikon yaitu tanda yang mengandung hubungan visual atau kesamaan antara tanda dengan sesuatu yang dimaknai. Ikon lebih menekankan pada perihal hubungan kesamaan pada sesuatu. Pancasila bisa saja dikatakan sebagai ikon, karena ada hubungan dengan istilah asli (*Pancasyila, Pancasyiila*), meskipun sebatas terminologis, bukan pada isinya. Pancasila merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal jauh sebelum digali dan ditemukan oleh para pendiri negara, sehingga bisa dianggap sebagai temuan yang inovatif, ide yang cemerlang. Pancasila bisa

dikatakan sebagai metafor, karena ia berasal dari istilah lain (Sanskerta) yang ditransposisikan ke dalam wilayah ideologi. Metafor adalah pemberian nama yang sebetulnya milik sesuatu yang lain; transferensi dari genus ke spesies, atau berdasarkan analogi. Pancasila adalah pemberian nama yang sebetulnya milik agama Budha. Bambang Sugiharto menyebutkan 3 ciri metafor: sesuatu yang dikenakan pada kata benda; metafor itu dimengerti sebagai *epiphora* (pemindahan atau gerakan atau transposisi istilah); dan transposisi sebuah nama yang asing (Sugiharto: 1996: 102). Dua ciri belakangan sesuai dengan Pancasila sebagai transposisi istilah, namun apakah Pancasila dapat dikatakan sebagai kata benda? Jawabnya, ya sebagai kata benda abstrak. Dengan demikian Pancasila bisa dianggap sebagai sebuah metafor, sekaligus sebagai ikon bangsa Indonesia.

Indeks adalah tanda yang dihubungkan dengan sesuatu atau tindakan yang mencoba untuk memaknai sesuatu dengan cara yang sama. Pancasila bisa saja dikatakan sebagai indeks ketika ia sebagai sistem tanda dihubungkan dengan tindakan bangsa Indonesia untuk memberikan makna dengan cara yang sama. Tetapi ini sungguh sangat riskan, karena pemahaman makna setiap warga negara tentang Pancasila hanya sama dalam batas tertentu. Misalnya: Dalam pendidikan, Pancasila dipahami dengan cara yang sama oleh siswa atau mahasiswa sebatas ranah kognitif. Secara teoretis, pemahaman yang sama itu masih mungkin, tetapi dalam kenyataannya sulit dilakukan. Contoh yang jelas ialah pemahaman atas makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Penganut agama Islam akan memahami makna sila I ini sebagai sebuah statemen tauhid, tetapi penganut agama lain atau aliran kepercayaan mungkin bisa berbeda. Oleh karena itu kedudukan Pancasila sebagai indeks mungkin mudah dipahami kalau dimaksudkan sebagai upaya penyeragaman, tetapi dalam dataran empiris, jelas sulit dipahami. Keadaan semacam itu yang berlaku dalam zaman Orde Baru, terutama melalui Penataran P-4 dimaksudkan menghasilkan manusia Pancasilais yang seragam.

Simbol merupakan tanda yang dikonvensi, mengandung hubungan yang total bersifat arbitrer dengan sesuatu yang dihadirkan. Simbol menurut Peirce (1998: 172) adalah satu tanda yang dimaksud sebagai tanda melulu atau terutama oleh fakta bahwa hal itu dipergunakan dan dimengerti sebagaimana adanya, baik kebiasaan

itu alamiah atau konvensional dan tanpa mempertimbangkan motif yang secara orisinal mengatur pemilihannya.

Makna simbolik ini tidak pasti, tetapi sangat tergantung pada wacana dan proses sosial. Pancasila lebih gayut dengan sistem simbol, karena ia merupakan sebuah konvensi dari para elit politik. Pancasila sebagai sistem simbol mengandung hubungan yang bersifat arbitrer dengan sesuatu yang dihadirkan, karena terjadi perkembangan interpretasi dari makna awal terminologi tersebut dengan makna Pancasila yang dipahami oleh bangsa Indonesia sekarang. Kekuatan Pancasila sebagai sistem simbol ini terletak pada kejelian dan kecermatan para elit politik dalam memilih istilah yang tepat bagi ideologi negara. Dalam sidang BPUPKI I, pengajuan istilah Pancasila oleh Soekarno direspons secara positif oleh peserta sidang, bukan lantaran kehebatan orasi semata, melainkan karena adanya kebutuhan yang mendesak pada saat itu tentang simbol pemersatu bangsa. Kekuatan Pancasila sebagai simbol pemersatu bangsa merupakan prasyarat sekaligus postulat bagi eksistensi bangsa Indonesia.

4. Pancasila dalam Cara pandang Notonagoro

Karya populer Notonagoro tentang Pancasila berjudul **Pancasila Secara Ilmiah Populer** boleh dikatakan mewakili cara pandang Notonagoro tentang Pancasila secara filosofis. Buku tersebut terdiri atas IX Bab, yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia, Isi arti Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, Landasan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, Kajian atas sila pertama sampai dengan sila kelima Pancasila, Pelaksanaan Pancasila. Notonagoro merupakan salah satu *homo significandum* atas ideologi Pancasila, yang sedikit banyak telah memberikan warna bagi pemahaman atas ideologi negara.

a. Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia;

Didasarkan atas argumentasi bahwa Pancasila itu merupakan sesuatu yang bersifat majemuk-tunggal (Eka-Pancasila). Pemahaman kita tentang Pancasila adalah kenyataan dalam objektivitasnya. Menarik analogi yang dipakai Notonagoro untuk menjelaskan perihal Pancasila sebagai kenyataan objektif, yaitu logam emas. Bagi Notonagoro hanya orang yang benar-benar ahli dapat mengetahui bahwa logam itu emas atau bukan. Pemahaman atas

Pancasila dalam arti yang objektif hanya dapat dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli (tentang ideologi). Senat Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 September 1951 dipandang sebagai komunitas elit ilmiah yang adekuat untuk merumuskan bahwa Pancasila itu bukan hanya konsepsi politis, melainkan juga asas pandangan dunia, pandangan hidup, hasil perenungan jiwa yang dalam, hasil penelaahan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas (Notonagoro, 1980: 3). Elit ilmiah, dalam hal ini Senat Universitas Gadjah Mada, dapat dipandang sebagai *homo significandum* atas Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. Persoalannya ialah, bagaimana prosedur ilmiah yang dilakukan elit ilmiah Universitas Gadjah Mada, sehingga tiba pada kesimpulan Pancasila merupakan asas pandangan dunia, hasil perenungan jiwa yang dalam, dan hasil penelaahan cipta yang teratur? Penulis menengarai bahwa pendekatan historis merupakan salah satu titik tolak yang cukup dominan untuk mengambil kesimpulan semacam itu, terutama titik pijak pada Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ditulis Muhammad Yamin pada halaman 289-292 yang secara khusus membicarakan tentang Falsafah-Negara Pancasila.

b. Arti Pancasila sebagai dasar filsafat negara mempunyai isi arti yang abstrak, umum, universal.

Dalam hal ini pemahaman lebih ditujukan pada makna masing-masing sila. Cara pendekatan yang dilakukan Notonagoro bercorak substansialistik, artinya setiap sila dikembalikan pada bentuk dasar, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kelima kata dasar itu menurut pandangan Notonagoro mempunyai arti yang abstrak. Kelima kata tersebut mempunyai arti yang umum, artinya meliputi jumlah hal yang tidak terbatas. Notonagoro juga menggunakan istilah umum universal untuk menengarai bahwa isi Pancasila itu bersifat tetap tidak berubah (Notonagoro, 1980: 32). Kalau kelima sila Pancasila itu diasalkan pada kata dasar, maka persoalannya ialah ketika masing-masing dikembalikan dalam kedudukannya sebagai sila Pancasila, masihkah mengandung sifat yang universal? Dalam hal ini Notonagoro memberi solusi dengan mengemukakan istilah umum kolektif atau umum jumali yang luasnya serba terbatas. Isi umum kolektif adalah penjumlahan dari isi yang diberikan oleh masing-masing pihak yang berbeda (seperti: agama, kepercayaan, pandangan dan pendirian hidup),

walaupun di antara yang berbeda itu terdapat unsur kesamaan (Notonagoro, 1980: 36). Satu hal yang penting dalam pengertian abstrak, umum, universal ini ialah memungkinkan sila-sila Pancasila itu dikembalikan kepada hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil (Notonagoro, 1980: 42).

Apabila cara pandang Notonagoro tentang Pancasila abstrak, umum, universal ini diletakkan dalam konsep triadik, maka sebuah representamen (abstrak-umum-universal) adalah sebuah subjek dari relasi triadik terhadap objek (Pancasila) sebagai hal kedua, yang terhubung dengan hal ketiga yang dinamakan interpretan (olah interpretasi yang dilakukan Notonagoro). Dalam relasi triadik ini setiap pengertian abstrak-umum-universal (*representament*) itu menentukan *interpretant*-nya (cara penafsiran Notonagoro) untuk menggantikan relasi triadik yang sama pada objek yang sama untuk beberapa interpretan (para penafsir lainnya seperti: para pengikut, baik yang pro maupun yang kontra). Dengan demikian konsep Pancasila abstrak-umum-universal mempunyai peluang untuk mendapatkan nafas baru sesuai dengan perkembangan zaman. Persoalannya ialah: apakah tafsir baru atas pengertian Pancasila abstrak-umum-universal itu? Inilah yang belum dilakukan oleh para murid dan cucu murid Notonagoro.

c. Teori kesatuan sila-sila Pancasila

Teori Notonagoro yang paling sering diajarkan oleh para murid Notonagoro dalam perkuliahan Pancasila dan Filsafat Pancasila adalah teori kesatuan sila-sila Pancasila. Ada tiga teori yang membicarakan tentang kesatuan sila-sila Pancasila. *Pertama*, Kesatuan majemuk tunggal bersifat organis, artinya sila-sila Pancasila merupakan bagian yang tidak saling bertentangan, bersama-sama menyusun satu kesatuan, dan setiap sila merupakan bagian yang mutlak. Jika dihilangkan satu sila, maka hilanglah fungsi Pancasila itu. Fungsi sila-sila itu adalah sebagai berikut: sila 1 dan 2 berfungsi sebagai Moral Negara. Sila 3 berfungsi sebagai Dasar Negara. Sila 4 berfungsi sebagai Sistem Negara. Sila 5 berfungsi sebagai Tujuan Negara (Noor Ms.Bakry, 1994: 47-48). *Kedua*, Bentuk Susunan Hirarkhis Piramidal, kesatuan bertingkat yang tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan pengkhususan dari sila di mukanya. Contoh rumusan Pancasila hirarkhis piramidal ialah sila pertama: meliputi dan

menjiwai sila 2,3,4, dan 5. Sila kedua diliputi dan dijiwai sila 1, meliputi dan menjiwai sila 3,4, dan 5. Dan seterusnya (Noor Muhsin Bakry, 1994: 49-50). *Ketiga*; Kesatuan Pancasila saling mengkualifikasi artinya kesatuan saling mensifati yang tiap sila mengandung keempat sila lainnya, sehingga sila-sila itu merupakan kesatuan tak terpisahkan. Contoh rumusnya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab yang dipersatukan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan seterusnya (Bakry, 1994: 56-57).

Ketiga teori kesatuan Pancasila itu pada intinya mengandung kesimpulan yang sama, yakni sila-sila Pancasila harus dipahami sebagai kesatuan sistematis.

4. Beberapa interpretator atas Pancasila

Driyarkara, Kuntowijoyo, Hardono Hadi, Eka Dharmaputera, dan lain-lain merupakan segelintir elit ilmiah yang telah menawarkan reinterpretasi atas Pancasila, sekaligus berperan sebagai *Homo Significandum* Pancasila. Setiap orang di Indonesia ini berhak membangun konstruksi pikir untuk memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, sejauh hal itu dilakukan dengan pendekatan ilmiah-rasional. Driyarkara bertitik tolak dari pendekatan humanistik-religijs. Kuntowijoyo lebih menekankan pada aspek korespondensi, koherensi, dan konsistensi melalui artikelnya Radikalisme Pancasila di KOMPAS. Hardono Hadi lebih bertitik tolak pada pemahaman Bhinneka Tunggal Ika sebagai sentral harmoni pluralitas dalam kesatuan. Eka Dharmaputera bertitik tolak dari pendekatan Antropologi budaya dengan meneropong Pancasila sebagai identitas sekaligus modernitas bangsa Indonesia melalui pendekatan “bukan ini, bukan itu”. Kesemuanya sah-sah saja dalam upaya pengayaan atas makna Pancasila sebagai simbol ideologi bangsa Pancasila.

C. Penutup

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa butir kesimpulan yang perlu mendapat perhatian dan perenungan lebih jauh dari elit ilmiah di Indonesia sebagai *Homo Significanda*.

Pertama; Pancasila dalam kedudukannya sebagai representamen, interpretan, dan objek menjadi sebuah problem dilematis antara nilai ideal dan utopis yang didambakan para pendiri negara dengan aplikasi tindakan yang justru tidak mencerminkan semangat idealisme tersebut. Fenomena: korupsi, anarkhi, pelanggaran HAM, kesenjangan kaya-miskin, dan lain sebagainya menjadikan nilai ideal itu semakin jauh panggang dari api. Kuntowijoyo menangkapnya sebagai bentuk inkonsistensi.

Kedua; Pancasila sebagai ikon, indeks sekaligus sistem simbol seharusnya memberi ruang gerak bagi interpretasi lain, sehingga kita tidak terjebak ke dalam tafsir monolitik yang justru mengerdilkan Pancasila itu sendiri, seperti yang pernah terjadi pada zaman Orde Baru. Artinya kekuatan Pancasila bukan terletak pada pemberian makna oleh para elit politik semata, namun keterlibatan seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki Pancasila sebagai warisan luhur bangsa yang dapat diasah terus-menerus dan terbuka terhadap semangat dan perkembangan zaman. Dalam hal ini para elit-ilmiah memiliki peluang untuk *sharing* bagi pengayaan makna ideologis, sehingga Pancasila tidak menjadi fosil yang nir-makna.

Ketiga; Notonagoro merupakan salah satu *homo significandum* atas Pancasila dengan berbagai upaya reinterpretasi atas ideologi negara pada tataran filosofis. Penekanan pada analisis substansialistik dengan mengacu pada kata dasar masing-masing sila (Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil) merupakan suatu upaya cerdas untuk menempatkan Pancasila dalam pengertian abstrak, umum, universal. Cara pandang Notonagoro atas Pancasila abstrak-umum-universal menggambarkan konsep triadik antara representamen, objek, dan interpretan. Demikian pula tiga teori kesatuan Pancasila merupakan sumbangsih yang sangat berharga untuk memahami Pancasila dalam tataran filosofis.

Keempat; Ketika bangsa Indonesia memperlakukan Pancasila sebagai mantera sakti untuk mengusir roh jahat ideologi asing, maka Pancasila bukan lagi ideologi yang logis-rasional, melainkan berubah menjadi mitos. Pendidikan Pancasila mulai dari tingkat SD hingga ke PT seyogyanya mengajak siswa dan mahasiswa untuk mulai bersikap kritis dan melakukan perbandingan antar ideologi, sehingga sedimentasi sejarah berkembang ke arah pendewasaan cara berpikir bukan doktrinasi atau pembodohan. Kemudian menunjukkan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa,

sehingga ia benar-benar merupakan ideologi yang mampu memberi arah kehidupan yang jelas.

Kelima; sebuah ideologi tidak harus kalis terhadap perubahan, yang lebih penting ialah mengapa ia masih diperlukan oleh bangsa ini. Pendasaran logis-rasional dan *raison d'etre* atas alasan pentingnya ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia jauh lebih diperlukan ketimbang mencari legitimasi historis. Generasi muda akan menganggap Pancasila sebagai ikon, indeks, dan simbol, manakala ia berperan nyata dalam ruang kehidupan mereka, sehingga mereka tidak kehilangan identitas dan mencari ikon baru yang banyak berkembang di dunia hiburan seperti: Indonesian Idols, KDI, AFI, Peterpan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sugiharto, 2000, **Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat**, Cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta.

Cassirer, Ernst, 1987, **Manusia dan Kebudayaan**, diindonesiakan oleh Alois A. Nugroho, Gramedia, Jakarta.

Chandler, Daniel, 2002, **Semiotics for Beginners: Signs**,

<http://WWW.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem02.html>.

Chandler, Daniel, 2002, **Semiotics: The Basics**, Routledge, London.

Daoed Joesoef., 1987, "Pancasila, Kebudayaan, Dan Ilmu, dalam **Pancasila Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu**, Penerbit BP Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

Deledalle, Gerard, 2000, **Charles Peirce's Philosophy of Signs: Essays in Comparative Semiotics**, Indiana University Press, Bloomington.

Eco, Umberto, 1976, **Theory of Semiotics**, Indiana University Press, Bloomington.

Eka Dharmaputera, 1997, **Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya**, BPK Gunung Mulia, Jakarta.

Heru Hendarto, 1993, “Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci”, dalam **Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan**, Penyunting: Tim Redaksi Driyarkara, Gramedia, Jakarta.

Kuntowijoyo, 1987, **Budaya dan Masyarakat**, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Muhammad Yamin, Tanpa Tahun, **Pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**, Tanpa Penerbit dan Kota Penerbit.

Noor Ms.Bakry, 1994, **Pancasila Yuridis Kenegaraan**, Liberty, Yogyakarta.

Notonagoro, 1979, **Beberapa Hal Tentang Pancasila**, Cetakan kedelapan, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.

Notonagoro, 1980, **Pancasila Secara Ilmiah Populer**, Pantjuran Tudjuh, Djakarta.

Peirce, C.S., 1998, **The Element of Logic**, Edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss, Thoemmes Press, England.

Pennings, Anthony, J., 2005, **Signs and Symbols**, <http://WWW.academic.marist.edu/pennings/viskeyw1.htm>

Poole, Ross, 1999, **Nation and Identity**, Routledge, London.

Renan, Ernest, 1994, **Apakah Bangsa Itu?**, Alih Bahasa: Sunario, Penerbit Alumni, Bandung.

Zoest, Art van, 1991, “Refleksi Atas Semiotik”, dalam **Jurnal Filsafat**, thn 1 no.1, Jakarta

[\(http://plato.stanford.edu/entries/nationalism/\)](http://plato.stanford.edu/entries/nationalism/)